

Kata Pengantar



“
*Seluruh
 Aparatur Sipil
 Negara di
 lingkungan Ditjen
 Migas wajib
 mengerti dan
 memahami arti
 dari nilai-nilai
 (value) KESDM
 yaitu jujur,
 profesional,
 inovatif,
 melayani, dan
 berarti serta
 mengedepankan
 kepentingan
 bangsa dan
 negara
 dibandingkan
 pribadi dan
 golongan.*”

Road map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2015 - 2019 disusun sebagai wujud dari pelaksanaan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor : 2.E/70/MEM/2016 tentang Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian ESDM.

Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Migas tahun 2015 - 2019 merupakan sebuah dokumen yang menjelaskan gambaran umum hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2014 serta perencanaan program kegiatan, strategi pelaksanaan dan hasil kegiatan yang mendukung program reformasi birokrasi KESDM serta program inisiasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang diinginkan selama 5 tahun kedepan. Dokumen ini merupakan panduan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Diharapkan *Road map* Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015 -2019 dapat menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan nyata serta dapat menjadi patokan dalam menetapkan kebijakan perubahan-perubahan menuju kemajuan pelayanan publik dan aspek lainnya yang tercantum dalam kegiatan delapan (8) area perubahan.

Jakarta, April 2016
 Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

IGN. Wiratmaja Puja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan, perundang-undangan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran *grand design* Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Roadmap reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2015 – 2019 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional khususnya dalam melakukan pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi agar terwujud ketahanan energi migas yang memegang peran vital dalam energi nasional.

BAB I PENDAHULUAN

Tugas dan Fungsi Ditjen Migas

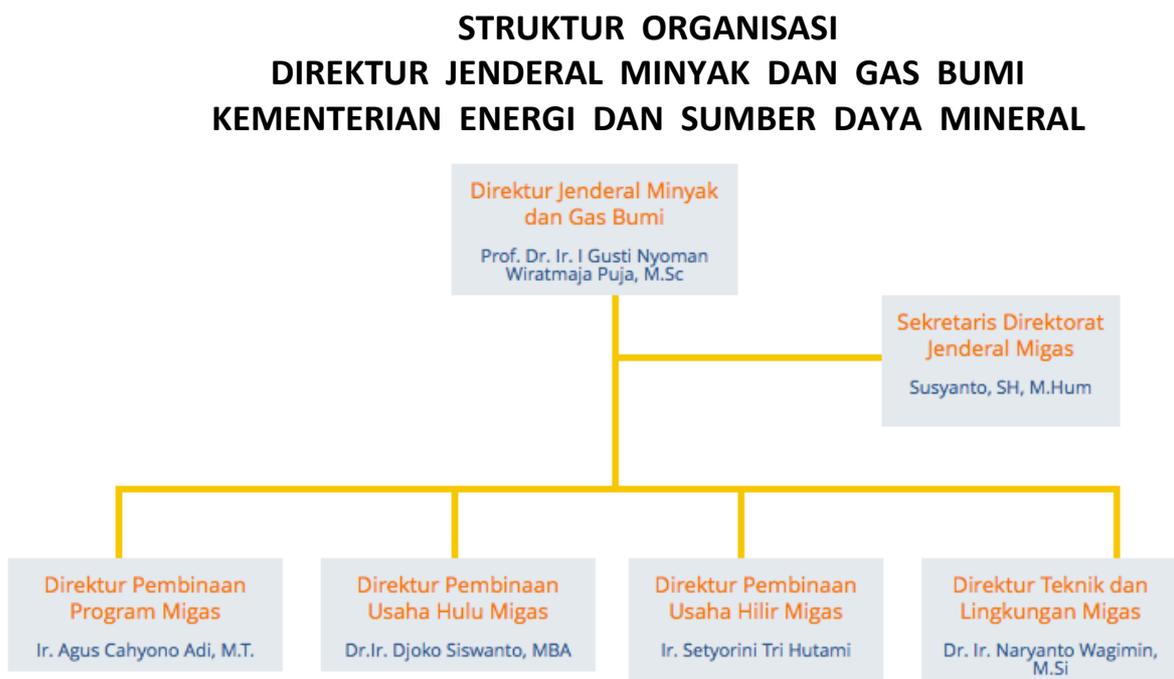
Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber energi yang tak dapat diperbaharui (*non renewable*), tidak saja membutuhkan metode pengelolaan yang tepat, tetapi juga memerlukan dukungan modal yang besar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai negara yang dianugerahi sumber kekayaan alam minyak dan gas bumi, Indonesia mempunyai potensi yang besar menjadi tujuan investasi yang menarik bagi calon investor. Selama ini industri minyak dan gas bumi telah terbukti berperan mendukung perekonomian nasional dan menjadi andalan penerimaan negara. Sesuai dengan Ayat 1 Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Menipisnya cadangan minyak mendorong pemerintah melakukan percepatan perubahan paradigma penggunaan energi di antaranya pemanfaatan gas untuk kebutuhan energi domestik meliputi gas untuk listrik dan industri pupuk domestik, program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg dan pengembangan gas kota. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengalokasian minyak bumi ke depan, kebijakan pemerintah antara lain sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan gas bumi diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keekonomian pengembangan lapangan;
- b. Mendorong konsumen gas domestik untuk membeli gas dengan harga keekonomian;
- c. Alokasi pemanfaatan cadangan gas bumi yang baru ditemukan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan setempat. Apabila terdapat kelebihan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan gas bumi untuk ekspor, akan tetapi mensyaratkan komitmen investor untuk berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur atau pengembangan migas domestik.

- Mengenai kebijakan pengalokasian gas untuk domestik (DMO) secara eksplisit tidak hanya untuk bagian kontraktor, tetapi juga ditujukan untuk gas bagian pemerintah;
- d. Perubahan eksplorasi Migas dari daerah Barat ke daerah Timur Indonesia;
 - e. Perubahan penemuan eksplorasi yang besar dari minyak bumi ke gas bumi;
 - f. Perubahan dari ekspor ke pemenuhan kebutuhan domestik dan Perubahan dari *Revenue Engine* menuju *Growth Engine*;
 - g. Melakukan perbaikan strategi pemeliharaan sehingga mengurangi terjadinya *unplanned shutdown* (termasuk memperhatikan terjadinya monsoon), melakukan sinkronisasi periode *planned shutdown* antara KKKS dengan user (terutama untuk produksi gas);
 - h. Mengupayakan produksi migas dari sumur-sumur tua;
 - i. Menyelesaikan tumpang tindih lahan dengan Menteri Kehutanan dan instansi terkait.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan unit instansi tingkat Eselon I yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan dibantu oleh 5 (lima) unit eselon II sebagaimana terlihat dalam gambar struktur organisasi di bawah ini



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Migas

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian ESDM disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

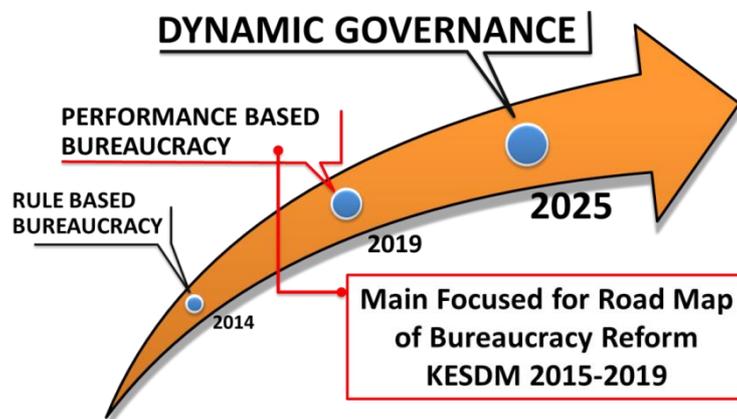
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal dimaksud, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Landasan Yuridis Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2015 -2019

Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 serta Surat Edaran Menteri ESDM nomor : 2.E/70/MEM/2016 tentang Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian ESDM. *Roadmap* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkelanjutan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya sehingga target kinerja dan kegiatan tahun per tahun akan jelas dan terukur seperti ditunjukkan pada Gambar1.2 berikut.



Sumber :PermenPAN-RB 11/20

Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki arti yang sangat penting sebagai pedoman kerja dalam mendorong suatu perubahan yang dilakukan secara terencana dan terlaksana dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perubahan tersebut diharapkan dapat mendorong budaya kerja organisasi yang lebih baik sehingga berkontribusi kedalam industri sub sektor migas yang lebih baik.

Perubahan yang dilakukan harus dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan berkesinambungan, sehingga setiap proses perubahan dapat dilaksanakan sesuai dengan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Materi *Roadmap* Reformasi Birokrasi KESDM 2015 – 2019 terdiri atas sasaran Reformasi Birokrasi dan strategi implementasinya yang meliputi 8 area perubahan, *quickwins*, program-program dan rencana aksi yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta sasaran Reformasi Birokrasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.4. Reformasi Birokrasi lingkup KESDM menekankan pada penciptaan terobosan baru, membiasakan berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada serta mengurai sumbatan-sumbatan.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

2.1. Sekilas perjalanan Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

Berdasarkan sejarahnya, bisa dikatakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bergabung dengan Kementerian ESDM pada tahun 1959. Pada saat itu, kementerian ESDM yang semula bernama Departemen Perindustrian dan Pertambangan membawahi bidang minyak dan gas bumi. Adapun demikian, pemerintah secara resmi mendirikan Biro Minyak dan Gas Bumi yang merupakan cikal bakal Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 1961. Kemudian pada tahun 1963 Biro Minyak dan Gas Bumi dinamakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas bumi hingga saat ini.

Dewasa ini kinerja pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk memperbaiki layanan kepada publik dari segala aspek birokrasi yang ada, baik itu sumber daya aparaturnya, kelembagaan, tata peraturan perundang-undangan, tata laksana, dan elemen birokrasi lainnya. Seiring dengan tuntutan tersebut, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 yang menjadi dasar bagi Kementerian ESDM c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi.

Sesuai surat edaran Menteri ESDM nomor 2. E/70/MEM/2016 tentang Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019 Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian ESDM yang salah satu isi dari surat edaran dimaksud adalah setiap Unit Eselon I di lingkungan KESDM wajib menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, yang terdiri dari area :

1. Manajemen perubahan;
2. Penguatan sistem pengawasan;
3. Penguatan akuntabilitas kinerja;
4. Penguatan kelembagaan;
5. Penguatan tata laksana;
6. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia ASN;
7. Penguatan peraturan perundang-undangan; dan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Proses Reformasi Birokrasi



Gambar 2.1 Proses Kegiatan Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendukung sepenuhnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Secara umum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan berbagai terobosan-terobosan strategis untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang baik melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi seperti dipaparkan secara singkat di bawah ini.

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (Mental Perilaku Aparatur)

Kemajuan yang telah dicapai pada program manajemen perubahan (mental perilaku aparatur) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
2. Rapat pimpinan diperluas para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Pembahasan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan dimaksud merupakan pertemuan rutin antar pegawai dan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam membahas program-program prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, *progress* pelaksanaannya serta membahas kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas dimaksud.

II. PENGAWASAN

Untuk area pengawasan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi, *Whistleblower system*, LHKPN, dan LHKASN. Kegiatan dimaksud merupakan bentuk peduli Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam rangka memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi agar mengerti dan memahami tentang bentuk-bentuk gratifikasi khususnya untuk mencegah timbulnya praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu para penyelenggara negara yang berkaitan dengan kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi seperti Pejabat Eselon I dan II, Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan panitia lelang di lingkungan unit layanan pengadaan wajib untuk membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komis Pemberantasan Korupsi (KPK)

III. AKUNTABILITAS

Hal-hal yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam penguatan akuntabilitas kinerja adalah:

1. Pengawasan dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015;
2. Monitoring dan evaluasi indikator kegiatan melalui *e-monev* Bappenas;

3. Penyusunan laporan keuangan Ditjen Migas;
4. Penyusunan laporan tahunan Ditjen Migas;
5. Penyusunan statistik Ditjen Migas.

IV. KELEMBAGAAN

Kemajuan yang telah dicapai pada program kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah pengusulan pembentukan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur. Perkembangan saat ini mengenai usulan pembentukan unit Eselon II baru Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas sedang dalam proses pembahasan dengan internal Ditjen Migas dan internal KESDM serta kementerian PAN RB.

V. TATA LAKSANA

Di area tata laksana Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan registrasi, distribusi, dan pengendalian surat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempergunakan software surat. Adapun untuk di tahun 2016 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sedang mempersiapkan keberadaan *war room* , ruang call center, inventarisasi SOP teknis dan SOP administrasi pemerintahan serta penyempurnaan tata persuratan elektronik dan kearsipan

VI. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA

Pada tahun 2015 yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam hal penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur adalah melakukan rotasi kepada 144 (seratus empat puluh empat) pegawai dengan jabatan fungsional umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penyegaran suasana kerja baru kepada para pegawai dan menghilangkan *comfort zone* yang selama ini sering terjadi di kalangan pegawai yang menempati unit tertentu.

VII. PENATAAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Kemajuan yang telah dicapai pada program penataan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan,

- Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Berupa CNG untuk Transportasi Jalan;
2. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Nelayan Kecil;
 3. Peraturan Presiden No. 146 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kilang Minyak Dalam Negeri;
 4. Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya;
 5. Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi;
 6. Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;
 7. Peraturan Menteri ESDM No. 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Bahan Bakar Minyak;
 8. Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Kompetensi Tenaga Kerja di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
 9. Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Penataan peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi diharapkan dapat menjadi penggerak bagi perekonomian nasional dan mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip –prinsip keselamatan di sub sektor minyak dan gas bumi.

VIII. PELAYANAN PUBLIK

Kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :

1. Promosi Keikutsertaan dalam lomba inovasi pelayanan publik yaitu menciptakan inovasi *e-lelang* wilayah kerja migas yang memberikan pelayanan murah, mudah, dan efisien dalam penawaran wilayah kerja migas;
2. Penerbitan Permen ESDM no. 23 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang Migas dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada kepala BKPM sehingga pelaksanaan proses perizinan sub sektor migas sudah dilaksanakan di BKPM.

2.2. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan pada 8 (delapan) area perubahan adalah sebagai berikut:

Manajemen Perubahan/ Mental Aparatur

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan manajemen perubahan/ mental aparatur antara lain:

1. *The right man on the right place*;
2. Tercipta hubungan kerja yang selaras dan harmonis antara atasan dan bawahan;
3. Stabilitas etos kerja setiap pegawai dapat terjaga dengan baik

Pengawasan

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan pengawasan antara lain:

1. Disiplin PNS dapat meningkat, hasil kerja pun dapat maksimal;
2. Pengawasan kegiatan migas di sektor hulu dan hilir migas menjadi lebih efektif.

Akuntabilitas

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan Akuntabilitas antara lain:

1. Tidak ada tumpang tindih pekerjaan;
2. Progress pekerjaan setiap unit bisa termonitoring;
3. Iklim investasi dalam negeri dapat meningkat.

Kelembagaan

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan kelembagaan antara lain:

1. Ada kejelasan prosedur dalam pelaksanaan pekerjaan;
2. Fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menjadi lebih kuat dan jelas;
3. Memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di sektor Migas;
4. Fungsi tiap-tiap unit Eselon II Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menjadi lebih kuat dan jelas.

Tatalaksana

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan tatalaksana antara lain:

1. Proses perizinan yang menjadi *paperless*;
2. Tindak lanjut disposisi menjadi lebih cepat;
3. Penyebaran informasi-informasi penting kepada seluruh pegawai menjadi lebih cepat melalui jaringan internet;
4. Terbentuk proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis IT;
5. Pencarian informasi dan data kemigasan menjadi mudah dan cepat;
6. Pembangunan infrastruktur migas menjadi lebih fokus dan terarah.

Sumber Daya Manusia Aparatur

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain Proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di sub sektor migas dapat berjalan secara maksimal, efektif, efisien dengan dukungan SDM aparaturnya yang jujur, profesional, inovatif, melayani, dan berarti. Sehingga tercipta *good governance* dalam melakukan pelayanan publik di sub sektor kemigasan.

Peraturan Perundang-undangan

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menjadi lebih kuat dan jelas;
2. Memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di sub sektor Migas.

Pelayanan Publik

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan publik antara lain:

1. Proses pelayanan menjadi murah, mudah, dan cepat;
2. *Stakeholders* dapat memonitoring *progress* izinnya kapanpun dan dimanapun;
3. Tercipta lelang wilayah kerja migas yang efektif, efisien, murah, mudah, dan cepat

2.3. Tantangan dan Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Migas

Berdasarkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi maka tantangan dan permasalahan pada (8) delapan area perubahan adalah sebagai berikut:

Manajemen Perubahan/ Mental Aparatur

Pada area manajemen perubahan/ mental aparatur tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut:

1. Masih kuatnya nepotisme di kalangan-kalangan tertentu terkait pengangkatan Pejabat;
2. Minimnya kesadaran pegawai dalam memanfaatkan teknologi informasi/ IT base;
3. Terdapat golongan pegawai yang apatis atau demotivasi kerja akibat ketidakcocokan antara atasan dan bawahan dalam proses pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di kantor.

Pengawasan

Pada area pengawasan tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut:

1. Belum ada kebijakan terkait perhitungan *reward/overtime* bagi pegawai;
2. terdapat beberapa ketidaksesuaian antara syarat jabatan Inspektur Migas dan latar belakang pendidikan pegawai yang akan diangkat menjadi Inspektur Migas

Akuntabilitas

Pada area akuntabilitas tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat tumpang tindih pekerjaan di setiap unit kerja;

2. Belum terdapat standar baku format penilaian *performance* pegawai.

Kelembagaan

Kelembagaan birokrasi pemerintahan masih belum efektif. Kelembagaan birokrasi pemerintahan masih dihindangi permasalahan yang mendasar, yaitu:

1. Sulitnya dalam mengusulkan pengembangan organisasi kepada instansi terkait;
2. Belum semua unit memiliki SOP terkait pekerjaan dan tupoksinya;
3. Pembagian tugas pekerjaan yang belum sepenuhnya jelas, siapa mengerjakan apa.

Tatalaksana

Penataan tatalaksana pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masing-masing unit kerja.

Pada area tatalaksana tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua unit memberikan dukungan penuh terhadap pemberian data-data kemigas, karena data-data tertentu bersifat rahasia;
2. Fasilitas jaringan komputer yang masih memerlukan penataan lagi dan penyediaan bandwidth yang lebih besar guna mendukung program *IT base*.

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pada area SDM Aparatur tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang relatif sama di masing-masing level PNS, menyebabkan potensi kinerja positif di masing-masing pegawai menjadi tidak semangat untuk menyalurkannya;
2. Belum terjalin hubungan internship antar pegawai, sehingga budaya kekeluargaan masih belum terbentuk dengan baik;
3. Demotivasi para pejabat terkait adanya nonjob jabatan struktural;
4. Program dan sistem pelatihan *training* yang tidak mencukupi untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peraturan Perundang-undangan

Perubahan peraturan perundang-undangan di sub sektor Migas dilakukan karena adanya permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur politis masih berpengaruh kuat terhadap revisi UU Migas;
2. Terdapat kepentingan-kepentingan politis dalam pelaksanaan kegiatan migas;
3. Masih mengedepankan ego sektoral masing-masing.

Pelayanan Publik

Peningkatan Pelayanan Publik pada Unit Kerja di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pada area pelayanan publik tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya server yang mumpuni untuk menampung aplikasi online dan peralatan pendukung IT yang masih kurang maksimal;
2. Belum seluruh jenis layanan dapat memberikan layanan yang terbaik, sehingga masih terus dilakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan dan perbaikan baik sarana, prasarana, prosedur maupun sistem layanan;
3. Petugas layanan perizinan sebagian besar bukan dari PNS yang *capable* (masih menggunakan tenaga honorer).

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI PERIODE TAHUN 2015 – 2019

Dewasa ini kita makin menyadari bahwa faktor manusia memegang peran kunci di dalam usaha pemerintah untuk maju dan bertumbuh kembang bersama masyarakat secara berkelanjutan. Kesadaran ini baru bermakna apabila disertai dengan perubahan mendasar pada anggapan kita tentang manusia dari sumber daya manusia (*human resources*) menjadi manusia yang bersumber daya (*human capital*).

Manusia memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, karena hanya manusia yang mampu memberikan respon cepat dan cerdas atas tantangan dari lingkungan yang berubah-ubah secara tidak menentu, kacau, dan sukar diprediksi. Penggerak dan penentu arah pemerintah adalah keputusan manusia bukan dana atau teknologi. Pencipta nilai adalah manusia sedangkan teknologi hanyalah instrumen yang digunakan untuk melipatgandakan kebajikan, potensi, dan kapabilitasnya untuk menciptakan nilai. Karena itu nilai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan makin ditentukan oleh nilai usaha insani yang berbasis pada kebajikan dan kapabilitas pelakunya.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan

disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 - 2019 memiliki 3 (tiga) *level of concern* yaitu pengembangan SDM (people), penataan proses bisnis (*culture*), dan penataan organisasi (structure). Inti perubahan dari Reformasi Birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* sumber daya aparatur. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur dan juga kepada seluruh sistem yang ada termasuk di dalamnya perbaikan dan penyempurnaan proses bisnis serta penataan organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Agenda Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi periode 2015 – 2019 yang mengarusutamakan perubahan wajah birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang sebelumnya bersifat kaku, mekanistik, dan *impersonal* menjadi birokrasi yang fleksibel dan inovatif dalam memberikan pelayanan prima kepada publik serta adaptif menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis eksternalnya. Rencana perubahan tersebut direpresentasikan ke dalam 8 (delapan) area perubahan

3.1 Manajemen Perubahan

Program kegiatan yang akan dilakukan dalam Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada area manajemen perubahan terdiri dari 3 (tiga) program utama yaitu penataan pola pikir dan budaya kerja, penguatan Reformasi Birokrasi, serta penataan budaya pelayanan. Strategi pelaksanaan dalam area ini adalah dengan menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, menyusun strategi automasi pelaksanaan kinerja pegawai, melaksanakan *communication plan* dan mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat perubahan budaya kerja, menyusun strategi perubahan pola pikir domestik menjadi global, pengembangan dan penyempurnaan *roadmap* reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi reformasi

birokrasi, membentuk sistem pelayanan yang berorientasi pelayanan publik, dan membangun komitmen pegawai yang berorientasi pelayanan publik.

Hasil yang diharapkan adalah adanya hasil berupa :

1. Indeks kepuasan masyarakat dan indeks integritas meningkat;
2. Peningkatan kesadaran penggunaan teknologi informasi;
3. Terbangunnya kebersamaan persepsi komitmen dan konsistensi serta keterlibatan para pegawai dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
4. Berubahnya pemahaman pegawai mengenai pengaruh global terhadap domestik khususnya di Sub Sektor Migas;
5. Tersusun dan terinternalisasi nya program Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
6. Pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik; dan
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Ukuran keberhasilan dari program ini adalah peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks penggunaan teknologi informasi yang baik, teridentifikasi jenis budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, meningkatnya indeks profesionalisme dan reformasi birokrasi.

Program pada area manajemen perubahan dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.1 dibawah ini.

PROGRAM KEGIATAN				
2015	2016	2017	2018	2019
Membentuk tim pelaksana reformasi birokrasi unit Ditjen Migas				
Usulan nilai-nilai KESDM dari Ditjen Migas	Membentuk <i>role model</i> dari tingkat eselon II sampai tingkat satker eselon III			
	mengusulkan agen perubahan dari Ditjen Migas			
	Menyusun pedoman strategi internalisasi nilai-nilai KESDM di Ditjen Migas	Mensosialisasikan, mengimplementasikan, nilai-nilai KESDM di Ditjen Migas		
	Menyusun budaya kerja Ditjen Migas	Mengusulkan nilai-nilai Kode Etik KESDM dan usulan Kode Perilaku dari Ditjen Migas		
Usulan pelaksanaan forum komunikasi Teknologi Informasi	Pembentukan forum dan strategi internalisasi penggunaan Teknologi Informasi	Pengenalan sistem teknologi informasi (basic)	Pengenalan sistem teknologi informasi (intermediate)	Pengenalan sistem teknologi informasi (advanced)
	Melakukan assesment dan kompilasi terhadap budaya kerja yang terjadi di lingkungan kerja	Melakukan assesment dan menganalisa umpan balik serta kompilasi masalah yang belum terselesaikan untuk mendapatkan problem solve		
Usulan strategi perubahan pola pikir domestik menjadi global	Identifikasi pemahaman pegawai terhadap dampak global di industri migas	Pelaksanaan survei pengukuran indeks profesionalisme pegawai	Monitoring dan evaluasi	
			Pelatihan dan training yang mendukung perubahan pola pikir (EQ, SQ, IQ, kursus bahasa asing)	
Menyusun Road Map RB Ditjen Migas 2015-2019		Sosialisasi dan implementasi <i>road map</i> RB Ditjen Migas dan KESDM 2015-2019		
				Menyusun <i>draft road map</i> RB Ditjen Migas 2020-2025
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program RB Ditjen Migas				
Menyusun materi <i>mapping stakeholders</i>	Berperan serta dalam penyusunan proses bisnis level 0 s.d 1 di sektor ESDM dan Menyusun proses bisnis level 2 s.d 4 di Ditjen Migas	Menyusun budaya pelayanan publik yang prima (<i>service excellent</i>) KESDM	Sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan publik yang prima (<i>service excellent</i>) KESDM	Penataan budaya pelayanan
		Menyusun budaya pelayanan publik yang prima (<i>service excellent</i>) KESDM	Sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan publik yang prima (<i>service excellent</i>) KESDM	Penataan budaya pelayanan

Gambar 3.1. Program Area Manajemen Perubahan

3.2 Pengawasan

Program kegiatan dalam area pengawasan merupakan turunan dan lanjutan dari program Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM sebelumnya yang dituangkan ke dalam kegiatan area pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Program kegiatan di area ini terdiri dari 2 (dua) program yaitu penguatan kebijakan pengawasan dan penguatan pengawasan pelayanan publik. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah:

1. Laporan Keuangan yang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan;
3. Instansi Pemerintah dengan kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. *Whistleblowing System* (WBS) dan pengendalian gratifikasi.

Program pada area pengawasan dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.2.

PROGRAM PENGAWASAN				
Pembentukan tim infrastruktur untuk kegiatan strategis migas dalam rangka peningkatan pengawasan	Usulan Pembentukan Direktorat Infrastruktur dalam rangka peningkatan pengawasan	Pengembangan sistem informasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi tindak lanjut LHP	Meningkatkan sinergi sistem pengawasan dan pelaporan keuangan	Meningkatkan sinergi sistem pengawasan dan pelaporan keuangan
Penetapan basis akrual dalam laporan keuangan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan	Standarisasi dokumen terkait pencairan anggaran seperti misalnya BAST serta pengembangan sistem tracking penagihan anggaran			
Meningkatnya Upaya APIP dalam mendorong upaya meningkatnya status opini laporan keuangan	Bekerja sama dengan pihak eksternal yang independen seperti misalnya Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan usaha Hulu Migas	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik
2015	Penyusunan strategi untuk menurunkan tingkat temuan hasil pemeriksaan			
	Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK			
	Pemantauan penyerapan anggaran			
		2017	2018	2019
Pelatihan internal APIP Ditjen Migas oleh BPKP dan Itjen KESDM	Penetapan pelaksanaan SPIP dalam RKAKL Ditjen Migas	Peningkatan pengendalian internal di lingkungan Ditjen Migas dengan cara melakukan identifikasi atas lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian	Peningkatan pengendalian internal di Ditjen Migas dengan informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal	Peningkatan kapabilitas APIP Ditjen Migas seperti misalnya sertifikasi <i>Certified Internal Audit</i> (CIA)
	Update tim SPIP di lingkungan Ditjen Migas dan pelatihan tim SPIP mengenai pengendalian internal oleh BPKP/Itjen KESDM			
	Menentukan unit eselon II Ditjen Migas sebagai <i>best practice</i> WBK-WBBM dan menyusun anggota Tim WBK-WBBM Ditjen Migas	Mengintensifikan unit kerja WBK-WBBM	Studi Banding pelaksanaan WBK dan WBBM	Monitoring berkala unit kerja WBK/WBBM
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
Sosialisasi WBK-WBBM di lingkungan Ditjen Migas				
	Menyusun usulan Kebijakan yang mengatur penanganan benturan kepentingan (sub sektor Migas)		Implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KESDM	Move pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KESDM
		Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan
	Studi Banding WBS dan pengendalian gratifikasi (ke KPK)	Kuesioner pelaksanaan WBS dan pengendalian gratifikasi ke pemangku kepentingan	Penguatan WBS dan pengendalian gratifikasi	
Sosialisasi WBS				

Gambar 3.2. Program pada Area Pengawasan

3.3 Akuntabilitas

Program kegiatan dalam area akuntabilitas dilakukan dengan strategi penguatan akuntabilitas kinerja. Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan catatan tentang hasil-hasil yang dicapai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari fungsi kegiatan selama kurun waktu tertentu yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU menjadi ukuran atau indikator yang memberikan informasi tingkat keberhasilan organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas menjadi kata kunci sebagai perwujudan dari kewajiban Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menerapkan SAKIP yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan indikator kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan

dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan.

3. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta pelaporan data kinerja.

4. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

5. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu dan evaluasi kinerja merupakan langkah untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan.

Hasil yang diharapkan dari program penguatan akuntabilitas kinerja adalah semakin meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Tolak ukur keberhasilan program dapat dilihat dari peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori 'Baik'.

Program pada area akuntabilitas dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.3.

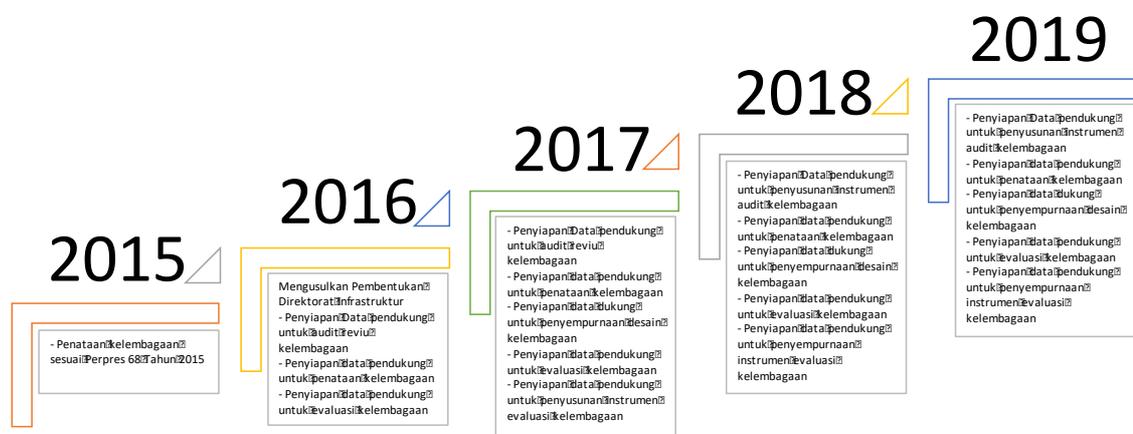
Menyusun kebijakan penguatan sistem akuntabilitas	Penyempurnaan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja Ditjen Migas	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik
	Penyempurnaan Data Kinerja LAKIP			
	Penyempurnaan sistem informasi untuk pelaporan keuangan yang terimplementasi dan terintegrasi	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem informasi	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem informasi	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem informasi
	Reviu Internal atas penyusunan laporan keuangan Ditjen Migas	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu internal	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu internal	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu internal
	Pelaksanaan dan evaluasi renstra	Pelaksanaan dan revisi Renstra		Tercapainya seluruh Renstra
PROGRAM AKUNTABILITAS				
2015	2016	2017	2018	2019
Mendukung penyusunan kebijakan penguatan sistem akuntabilitas	Penyajian informasi pelaporan berbasis web sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	Monitoring dan Evaluasi Penyajian informasi pelaporan berbasis web		
		Melakukan koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas untuk mendukung peningkatan sinergi sistem pelaporan	Melakukan koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan	Melakukan koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan
	Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi Ditjen Migas	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem manajemen kinerja	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem manajemen kinerja	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem manajemen kinerja
Mendukung komitmen untuk membuat sistem informasi untuk pengukuran kinerja	Mendukung pembuatan sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang terimplementasi dan terintegrasi	Melaksanakan sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang terimplementasi dan terintegrasi	Reviu internal terhadap pelaksanaan sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang terimplementasi dan terintegrasi	Reviu internal sebagai bahan penyempurnaan sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang terimplementasi dan terintegrasi

Gambar 3.3. Program pada Area Akuntabilitas

3.4. Kelembagaan

Program kegiatan dalam area kelembagaan dilakukan dengan strategi melakukan penguatan kelembagaan di semua unit eselon I dengan tujuan agar terwujudnya kelembagaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tatakelola Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang lebih baik. Ukuran keberhasilan diukur dengan peningkatan nilai Indeks Penguatan Kelembagaan.

Program pada area kelembagaan dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.4



Gambar 3.4. Program pada Area Kelembagaan

3.5. Tatalaksana

Ketidajelasan proses bisnis di instansi pemerintah seringkali menjadi kendala dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem tatalaksana yang baik akan mendorong proses pelayanan publik menjadi lebih cepat. Percepatan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah dapat dilakukan dengan penerapan *e-government* melalui pemanfaatan *Information Communication Technology* (ICT) yang dapat membuat sistem administrasi menjadi semakin efektif, efisien dan terintegrasi. Kegiatan yang dilakukan pada area tatalaksana yaitu program penguatan tatalaksana (SOP) dan *e-government*.

Strategi penguatan tatalaksana yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sinergi internal dan eksternal Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
2. Penguatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa;

Hasil yang diharapkan dari program penguatan tatalaksana ini adalah:

1. Terwujudnya proses tata laksana yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan prinsip *good governance*;
2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa.

Ukuran keberhasilan dalam area penguatan tatalaksana ini adalah:

1. Indeks kepuasan masyarakat;
2. Tersusunnya proses bisnis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa yang akuntabel.

Program pada area tatalaksana terlihat seperti Gambar 3.5.



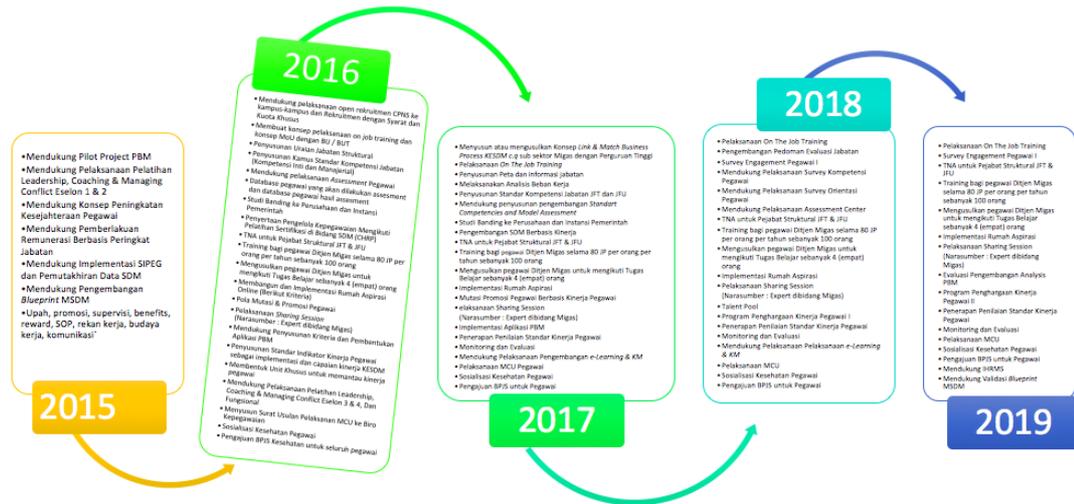
Gambar 3.5 Program Area Tatalaksana

3.6. Sumber Daya Manusia Aparatur

Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam area perubahan sumber daya manusia (SDM) aparatur mempunyai sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien dan terintegrasi, serta memiliki pelayanan publik berkualitas melalui program percepatan dan penguatan sistem manajemen SDM Aparatur. Program area perubahan SDM aparatur dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penataan sistem pengadaan SDM Aparatur;
2. Pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur;
3. Pelatihan *leadership coaching & managing conflict*;
4. Pelatihan sertifikasi SDM (CHRP);
5. Pengembangan standar kompetensi;
6. Pengembangan karir;
7. Pengembangan rumpun jabatan;
8. Pengembangan analisis *Performance-Based Management* (PBM);
9. Pola mutasi dan promosi SDM Aparatur;
10. Mendukung Survei kompetensi SDM Aparatur;
11. Survei orientasi SDM Aparatur;
12. *Survey engagement* SDM Aparatur;
13. Pengembangan standar kompetensi
14. *Mendukung Assessment* SDMAparatur;
15. Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian dan pemutakhiran data SDM Aparatur;
16. Pengembangan SDMAparatur berbasis kinerja;
17. Analisis beban kerja;
18. Analisis jabatan;
19. Pengembangan pedoman evaluasi jabatan;
20. *Talent pool*;
21. Melakukan fungsi pengawasan dengan baik;
22. TNA untuk Pejabat Struktural JFT & JFU;
23. Mewajibkan pegawai untuk melanjutkan sekolah;
24. *On the job training*;
25. *e-Learning & knowledge management*;
26. Peningkatan kesejahteraan pegawai dari sisi kesehatan; dan
27. Peningkatan kesejahteraan SDM Aparatur.

Program pada area perubahan SDM aparatur dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.6 di bawah ini



Gambar 3.6 Program Area SDM Aparatur

Hasil yang diharapkan dari area perubahan SDM aparatur adalah meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur. Ukuran keberhasilan program ini diukur dengan Nilai Indeks Kinerja dan Profesionalitas serta teridentifikasinya budaya kerja.

3.7. Penataan Perundang-Undangan

Program kegiatan dalam area perubahan penataan perundang-undangan mempunyai sasaran terciptanya birokrasi efektif, efisien dan terintegrasi dengan program penguatan peraturan perundangan. Program ini dilakukan dengan strategi implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi yang mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui evaluasi, kajian, deregulasi, peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pemanfaatan TIK dalam perumusan peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Hasil yang diharapkan dari adanya program ini adalah:

1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

Ukuran keberhasilan program penataan perundang-undangan diukur dengan tercapainya prioritas Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan indeks reformasi birokrasi dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:

1. Tersusunnya daftar identifikasi perundang-undangan yang dikeluarkan atau ditetapkan atau diundangkan oleh Kementerian/Lembaga dan sektor terkait dalam bentuk kerangka legislasi dan regulasi di subsektor Migas;
2. Tersusunnya daftar identifikasi perundang-undangan yang dikeluarkan atau ditetapkan atau diundangkan oleh Kementerian berupa daftar rekapitulasi sebagian peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan, tahun pengundangan, dan materi muatan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012;
3. Tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pembangunan nasional, dan perkembangan hukum;
4. Kesesuaian rancangan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar baik secara vertikal maupun horisontal yang telah mengakomodasi aspirasi masyarakat;
5. Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Diundangkannya Peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden/Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
7. Teridentifikasinya permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Program pada area penataan perundangan-undangan dilaksanakan dengan beberapa program berikut:

1. Melakukan upaya penyempurnaan atau mengubah peraturan perundang-undangan sub sektor Migas yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal;
2. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan pada sub sektor Migas melalui pemutakhiran data dan penelaahan peraturan perundang-undangan;

3. Penyusunan kajian regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat proses bisnis di sub sektor migas sesuai dengan program legislasi nasional, Tusi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan tindak lanjut putusan MK dan MA;
4. Aplikasi pemanfaatan TIK dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di sub sektor migas;
5. Penyusunan kajian dan peraturan yang mendorong pembentukan forum konsultasi publik dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan;
6. Penyempurnaan SOP dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perpres, Permen, Kepdirjen/Badan; dan juga didukung oleh program-program lainnya.

Program pada area ini seperti Gambar 3.7.



Gambar 3.7. Program Area Penataan Perundang-Undangan

3.8. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek penting yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Karena pada aspek inilah hasil dari pelaksanaan reformasi birokrasi bisa langsung dirasakan. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Program kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui 4 (empat) strategi yaitu:

1. Peningkatan kualitas implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;
2. Modernisasi system manajemen pelayanan publik yang meliputi SDM, ICT, dan standar pelayanan;
3. Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik;
4. Membuka ruang partisipasi publik melalui *citizen charter*; dan

Ukuran keberhasilan dari program terdiri atas 2 (dua) indikator yaitu:

1. Indeks persepsi korupsi; dan
2. Indeks kepuasan masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari program ini terdiri atas 3 (tiga) hal yaitu:

1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
3. Meningkatnya profesionalitas aparatur.

Program pada area pelayanan publik dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.8 ini.



Gambar 3.8. Program Area Pelayanan Publik

3.9. Quick Wins

Program *quick wins* Reformasi Birokrasi merupakan program unggulan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan dibantu oleh Unit Eselon I di lingkungan KESDM terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Tujuan dari program *quick wins* diharapkan perubahannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku organisasi dan struktur dibawah Kementerian ESDM turut serta membantu dan mendukung demi terselenggaranya pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik. Adapun program *quick wins* Reformasi Birokrasi KESDM seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Program Quick Wins Reformasi Birokrasi KESDM 2015 - 2019

2015	2016	2017	2018	2019
<i>Snapshot Mapping Stakeholders</i>	<i>LKj Award</i>	Audit/Riviu Kelembagan	<i>Assessment Center</i>	PTSP dengan ISO 9001 Manajemen Mutu Award
Nilai-nilai KESDM	<i>Reward and Punishment System</i>	<i>Performance Based Management</i>	Indeks Korupsi pada Penyelenggara Pelayanan Publik "Baik"	Peta Proses Bisnis Level 4
Inovasi Pelayanan Publik	Kompetisi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	Peta Proses Bisnis Level 3	Harmonisasi Sistem Integrasi SOP antar Unit/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
	Peta Proses Bisnis Level 1	Peta Proses Bisnis Level 2	Terintegrasinya SOP Kegiatan dan Layanan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah	
	Terintegrasinya SOP Kegiatan dan Layanan Antar Unit	Terintegrasinya SOP Kegiatan dan Layanan Antar K/L	Aplikasi ICT dalam proses penyusunan dan pembentukan penataan perundang-undangan	
	<i>Agent of Change</i>	Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam Penyusunan Regulasi dan Kebijakan		
		Budaya Kerja		

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Monitoring

Monitoring dilakukan untuk memastikan semua program Reformasi Birokrasi berjalan dengan lancar, didokumentasikan dengan baik, dilakukan evaluasi terhadap keberhasilannya sesuai indikator masing-masing dan diberikan umpan balik untuk penyempurnaan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya monitoring dan evaluasi dilakukan oleh APIP, SPIP, dan lembaga pengawasan lain seperti BPK dan Kementerian PAN dan RB. Namun demikian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk membantu Direktur Jenderal memastikan bahwa program-program dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sejalan dengan Program Kementerian ESDM, program-program yang ada telah mengikuti/menggunakan indikator yang baku dan telah dilakukan dokumentasikan kegiatan dengan baik.

Tim Monitoring Evaluasi (Monev) dibentuk oleh Dirjen Migas, tugas pokok tim adalah menjadi penjamin kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan menjamin bahwa semua persyaratan dan aturan telah dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Kegiatan monitoring dan evaluasi menitikberatkan pada ketepatan waktu pelaksanaan dari setiap area perubahan dengan jadwal yang telah ditetapkan, terpenuhinya indikator dan kesesuaian dengan program Kementerian dan nasional.

Dalam implementasi, Tim Monev akan memberikan masukan-masukan kepada pengelola ataupun koordinator setiap area pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan setiap semesteran dan tahunan; dan
3. Evaluasi keberhasilan menyeluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KESDM.

Kriteria keberhasilan dari proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilihat dari kemampuan tim menyusun laporan dan memberi rekomendasi-rekomendasi sesuai tugas pokoknya secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan.

Secara lebih spesifik, tujuan monitoring adalah:

1. Mendapatkan informasi yang tepat pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
2. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi bila dikaitkan dengan rencana yang telah disusun;
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi;
4. Mendorong terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
5. Mengetahui kelemahan-kelemahan implementasi program
6. Midentifikasi alternative dan solusi atas kendala dan kelemahan implementasi program;
7. Memperbaiki proses pelaksanaan program;
8. Memastikan target reformasi tercapai sesuai dengan tata waktu dan prioritas yang telah disepakati.

Pada dasarnya Monitoring dilakukan sejak program reformasi direncanakan dan selama dimplementasikan sampai program dinyatakan selesai. Monitoring dan evaluasi dilakukan antara lain dengan:

1. Melakukan evaluasi atas program-program yang ada meliputi kesesuaian dengan program Kementerian dan prioritas nasional;
2. Melakukan evaluasi atas indikator keberhasilan yang digunakan;
3. Melakukan evaluasi atas pengelolaan laporan;
4. Observasi, pengawasan, verifikasi, dan validasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan;
5. Menilai kesesuaian program-program Reformasi Birokrasi dengan *roadmap* yang telah disetujui;
6. Mengolah hasil monitoring;
7. Memberikan masukan guna perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan;
8. Laporan hasil monitoring disusun paling tidak setiap 6 (enam) bulan sekali.

Langkah-langkah pelaksanaan monitoring seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Outcome	Kriteria Keberhasilan
1	Monitoring	Laporan Monitoring	Menyusun rencana, pembentukan tim, penetapan metode, teknik dan instrumen yang digunakan	Tersusunnya rencana monitoring RB	Naskah Rencana monitoring RB sebagai panduan pelaksanaan
			Melaksanakan observasi, pengambilan sampel, pengawasan, verifikasi dan validasi sehingga memperoleh data yang dibutuhkan atas pelaksanaan kegiatan.	Terbentuknya sebuah sistem monitoring yang menyeluruh	Tim dapat melakukan monitoring secara menyeluruh tanpa mengalami hambatan/resistensi apapun
			Menyusun dan menyampaikan laporan kepada penanggungjawab kegiatan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan.	Tersusunnya sebuah laporan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi semester, tahunan dan 5 (lima) tahunan	Tim dapat melaporkan kondisi paling terkini dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap saat diperlukan

4.2 Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah proses untuk menilai secara obyektif efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam sebuah evaluasi, dilakukan pengukuran hasil capaian dan dampak yang diakibatkan dari sebuah pelaksanaan kegiatan dimaksud sehingga didapat sebuah rekomendasi sebagai umpan balik untuk melakukan penyempurnaan.

Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dilaksanakan bertujuan :

1. Menguji data yang didapat dari monitoring dari suatu kegiatan program untuk mengetahui tercapai tidak tujuan, faktor pendukung

- dan faktor penghambat tercapainya tujuan dan menemukan solusi atas hambatan yang dihadapi;
2. Menguji pelaksanaan kegiatan untuk menentukan perlu atau dapat tidaknya dilanjutkan atau menentukan penyempurnaan/penyesuaian yang perlu dilakukan;
 3. Memberikan masukan kepada pelaksana program untuk memastikan bahwa program program yang dilaksanakan sesuai dengan program Kementerian sehingga memenuhi kriteria capaian yang maksimal dari Monitoring Kementerian yaitu Itjen maupun BPK dan UPRB, dan;
 4. Memberi masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 4.2.

Kriteria keberhasilan program evaluasi tahunan

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Output	Kriteria Keberhasilan
1	Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali)	Laporan evaluasi tengah tahunan/ semesteran dan tahunan	Membuat rencana evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi internal	Dokumen Rencana evaluasi pelaksanaan RB	Tersusunnya dokumen rencana evaluasi pelaksanaan RB
			Membuat desain sistem evaluasi pelaksanaan RB	Desain sistem evaluasi RB	Tersedianya desain sistem evaluasi RB
			Melakukan <i>launching</i> sistem evaluasi kepada pengelola program	laporan sosialisasi sistem evaluasi	Digunakannya sistem evaluasi oleh pengelola program
			Menyebarkan buku panduan evaluasi kepada pengelola program	Informasi mengenai buku panduan evaluasi	Informasi buku panduan evaluasi dapat dipahami

			Menerapkan sistem evaluasi pelaksanaan RB	Terhimpunnya informasi evaluasi pelaksanaan program-program RB	Tersedia informasi evaluasi komprehensif pelaksanaan program-program RB dan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh Tim Monitoring Kementerian maupun Nasional
			Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program-program RB	Laporan evaluasi pelaksanaan program-program RB	Laporan evaluasi pelaksanaan program-program RB dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan
			Menyusun rekomendasi upaya perbaikan pelaksanaan program secara berkelanjutan	Rekomendasi perbaikan pelaksanaan program-program RB	Adanya penyempurnaan dalam pelaksanaan program-program RB

Tabel 4.3.

Kriteria Keberhasilan Program Evaluasi Menyeluruh

No	Program/ Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Output	Kriteria Keberhasilan
1	Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester kedua 2019)	Laporan evaluasi lima tahunan	Membuat rencana evaluasi menyeluruh (lima tahunan) pelaksanaan program-program RB	Dokumen rencana evaluasi menyeluruh pelaksanaan program RB tahun 2015 - 2019	Tersedianya dokumen rencana evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB tahun 2015 - 2019
			Finalisasi kerangka/desain evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB	Sistem Evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB	Sistem evaluasi menyeluruh berfungsi dengan baik
			Menyusun buku panduan evaluasi menyeluruh pelaksanaan program	Buku panduan evaluasi menyeluruh pelaksanaan program	Buku panduan evaluasi menyeluruh pelaksanaan program dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan RB

			Melakukan launching sistem evaluasi menyeluruh kepada pengelola program	Laporan sosialisasi sistem evaluasi menyeluruh	Buku panduan evaluasi menyeluruh dipahami dan diacu oleh pengelola program
			Menyebarkan buku panduan evaluasi menyeluruh kepada pengelola program	Buku panduan evaluasi menyeluruh diterima oleh pengelola program	Buku panduan evaluasi menyeluruh dipahami dan diacu oleh pengelola program
			Menerapkan rancangan/ desain evaluasi menyeluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi internal	Informasi hasil evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB di semua bidang tahun 2015 - 2019	Informasi hasil evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB di semua bidang tahun 2015 - 2019 dapat memenuhi kebutuhan <i>Tim Monitoring dari Kementerian maupun Nasional dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan</i>
			Menyusun laporan evaluasi menyeluruh	Laporan evaluasi menyeluruh di semua bidang tahun 2015 - 2019	Laporan evaluasi pelaksanaan program-program RB dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan
			Menyusun rekomendasi upaya perbaikan pelaksanaan program secara berkelanjutan	Rekomendasi perbaikan pelaksanaan RB di semua program	Perbaikan pelaksanaan RB semua program untuk tahun berikutnya

BAB V

PENUTUP

Roadmap reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015 – 2019 disusun berdasarkan program-program prioritas yang dirangkum ke dalam matrik kegiatan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Penyusunan *roadmap* reformasi birokrasi ini melibatkan anggota tim pelaksana reformasi birokrasi beserta jajaran pimpinan di lingkungan Ditjen Migas.

Pencapaian dari pelaksanaan *roadmap* reformasi birokrasi ini hanya akan menjadi tulisan semata apabila tidak didukung oleh aspek-aspek yang ada di dalam organisasi tersebut seperti komitmen pimpinan yang kuat, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, penerapan manajemen perubahan yang konsisten, pemberdayaan SDM yang maksimal, dan tindak lanjut dari monitoring evaluasi kegiatan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan *roadmap* reformasi birokrasi ini akan mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik, menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang sederhana, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan negara.

Namun apabila pelaksanaan dari *roadmap* reformasi birokrasi itu gagal akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi menghadapi kompleksitas perubahan birokrasi yang bergerak secara eksponensial, antipati, ketidakpercayaan masyarakat, dan dapat menghambat pembangunan nasional.

Demikian *roadmap* Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2015 – 2019 yang telah disusun agar dapat menjadi pedoman dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan khususnya mengintegrasikan setiap program-program area perubahan ke dalam pola pikir aparatur sipil negara.

Area Manajemen Perubahan

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Mental dan pola pikir Aparatur	Penataan pola pikir dan budaya kerja (Manajemen Perubahan)	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi	Indeks kepuasan masyarakat dan indeks integritas, meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks integritas, Meningkat	Membentuk tim pelaksana reformasi birokrasi unit Ditjen Migas				
						Usulan nilai-nilai KESDM dari Ditjen Migas	Membentuk <i>role model</i> dari tingkat eselon II sampai tingkat satker eselon III			
			mengusulkan agen perubahan dari Ditjen Migas							
			Menyusun pedoman strategi internalisasi nilai-nilai KESDM di Ditjen Migas	Mensosialisasikan, mengimplementasikan, nilai-nilai KESDM di Ditjen Migas						
			Menyusun budaya kerja Ditjen Migas	Mengusulkan nilai-nilai Kode Etik KESDM dan usulan Kode Perilaku dari Ditjen Migas						
Menyusun strategi automasi pelaksanaan kinerja pegawai	Peningkatan kesadaran penggunaan teknologi informasi	Indeks penggunaan teknologi informasi	Usulan pelaksanaan forum komunikasi Teknologi Informasi	Pembentukan forum dan strategi internalisasi penggunaan Teknologi Informasi	Pengenalan sistem teknologi informasi (basic)	Pengenalan sistem teknologi informasi (intermediate)	Pengenalan sistem teknologi informasi (advanced)			
Melaksanakan communication plan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat perubahan budaya kerja	Terbangunnya kebersamaan persepsi komitmen dan konsistensi serta keterlibatan para pegawai dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi	Teridentifikasi jenis budaya kerja di lingkungan Ditjen Migas		Melakukan assesment dan kompilasi terhadap budaya kerja yang terjadi di lingkungan kerja	Melakukan assesment dan menganalisa umpan balik serta kompilasi masalah yang belum terselesaikan untuk mendapatkan problem solve					

		Menyusun strategi perubahan pola pikir domestik menjadi global	Berubahnya pemahaman pegawai mengenai pengaruh global terhadap domestik khususnya di bidang migas	Indeks profesionalisme pegawai	Usulan strategi perubahan pola pikir domestik menjadi global	Identifikasi pemahaman pegawai terhadap dampak global di industri migas	Pelaksanaan survei pengukuran indeks profesionalisme pegawai	Monitoring dan evaluasi	
								Pelatihan dan training yang mendukung perubahan pola pikir (EQ, SQ, IQ, kursus bahasa asing)	
Birokrasi yang efektif dan efisien	Penguatan reformasi birokrasi	Pengembangan dan penyempurnaan <i>road map</i> RB Ditjen Migas	Tersusun dan terinternalisasinya program RB Ditjen Migas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat	Menyusun Road Map RB Ditjen Migas 2015-2019		Sosialisasi dan implementasi <i>road map</i> RB Ditjen Migas dan KESDM 2015-2019		
		Pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi Ditjen Migas	Pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program RB Ditjen Migas				Menyusun <i>draft road map</i> RB Ditjen Migas 2020-2025
Pelayanan publik yang berkualitas	Penataan budaya pelayanan	Membentuk sistem pelayanan yang berorientasi pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Ditjen Migas	Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat	Menyusun materi <i>mapping stakeholders</i>	Berperan serta dalam penyusunan proses bisnis level 0 s.d 1 di sektor ESDM dan Menyusun proses bisnis level 2 s.d 4 di Ditjen Migas	Menyusun budaya pelayanan publik yang prima (<i>service excellent</i>) KESDM	Sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan publik yang prima (<i>service excellent</i>) KESDM	Penataan budaya pelayanan
		Membangun komitmen pegawai yang berorientasi pelayanan publik			Menyusun materi <i>mapping stakeholders</i>		Menyusun budaya pelayanan publik yang prima (<i>service excellent</i>) KESDM	Sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan publik yang prima (<i>service excellent</i>) KESDM	Penataan budaya pelayanan

Area Pengawasan

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Pengawasan	Penguatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	<p>1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif</p> <p>2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergi</p> <p>3. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa</p>	Laporan Keuangan yang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	Hasil temuan pemeriksaan	Pembentukan tim infrastruktur untuk kegiatan strategis migas dalam rangka peningkatan pengawasan	Usulan Pembentukan Direktorat Infrastruktur dalam rangka peningkatan pengawasan	Pengembangan sistem informasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi tindak lanjut LHP	Meningkatkan sinergi sistem pengawasan dan pelaporan keuangan	Meningkatkan sinergi sistem pengawasan dan pelaporan keuangan
						Penetapan basis akrual dalam laporan keuangan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan	Standarisasi dokumen terkait pencairan anggaran seperti misalnya BAST serta pengembangan sistem tracking penagihan anggaran			
							Bekerja sama dengan pihak eksternal yang independen seperti misalnya Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan usaha Hulu Migas			
Meningkatnya Upaya Ditjen Migas dalam mendorong upaya meningkatnya	Penyusunan strategi untuk menurunkan tingkat temuan hasil pemeriksaan	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik						

						status opini laporan keuangan	Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK			
							Pemantauan penyerapan anggaran			
				Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan	Tingkat kapabilitas Ditjen Migas dan implementasi SPIP	Pelatihan internal SPIP Ditjen Migas oleh BPKP dan Itjen KESDM	Penetapan pelaksanaan SPIP dalam RKAKL Ditjen Migas Update tim SPIP di lingkungan Ditjen Migas dan pelatihan tim SPIP mengenai pengendalian internal oleh BPKP/Itjen KESDM	Peningkatan pengendalian internal di lingkungan Ditjen Migas dengan cara melakukan identifikasi atas lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian Update atas identifikasi resiko kegiatan unit di lingkungan Ditjen Migas.	Peningkatan pengendalian internal di Ditjen Migas dengan informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal	Peningkatan kapabilitas SPIP Ditjen Migas seperti misalnya sertifikasi <i>Certified Internal Audit (CIA)</i>
				Instansi Pemerintah dengan kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Tingkat kepuasan masyarakat		Menentukan unit eselon II Ditjen Migas sebagai <i>best practise</i> WBK-WBBM dan menyusun anggota Tim WBK-WBBM Ditjen Migas	Mengintensifkan unit kerja WBK WBBM	Studi Banding pelaksanaan WBK dan WBBM	Monitoring berkala unit kerja WBK/WBBM
			Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat			Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	
Sosialisasi WBK-WBBM di lingkungan Ditjen Migas										

				Penanganan benturan kepentingan	Tingkat penanganan benturan kepentingan yang baik		Menyusun usulan Kebijakan yang mengatur penanganan benturan kepentingan (sub sektor Migas)		Implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KESDM	<i>Monev</i> pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KESDM
								Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan
				<i>Whistleblowing System (WBS) dan pengendalian gratifikasi</i>	<i>Berkurangnya Tingkat Pengaduan dan Berkurangnya tingkat penyalahgunaan wewenang</i>		Studi Banding WBS dan pengendalian gratifikasi (ke KPK)	<i>Kuesioner pelaksanaan WBS dan pengendalian gratifikasi ke pemangku kepentingan</i>	Penguatan WBS dan pengendalian gratifikasi	
						Sosialisasi WBS				

Area Pelayanan Publik

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel	Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas implementasi UU 25/2009	Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik	Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat	Penetapan Permen ESDM tentang penyederhanaan proses perizinan dan pengalihan kepada PTSP BKPM	Implementasi dan evaluasi Permen ESDM dan SK Dirjen Migas tentang pelayanan publik di lingkungan Ditjen Migas	Implementasi Permen ESDM dan SK Dirjen Migas tentang pelayanan publik di lingkungan Ditjen Migas	Implementasi Permen ESDM dan SK Dirjen Migas tentang pelayanan publik di lingkungan Ditjen Migas	Evaluasi dan penyempurnaan Permen ESDM dan SK Dirjen Migas tentang pelayanan publik di lingkungan Ditjen Migas
						Penetapan Surat Keputusan Dirjen Migas tentang tahapan pendelegasian dan SOP perizinan				
			Modernisasi sistem manajemen pelayanan publik (SDM, ICT, Standar Pelayanan)			Evaluasi dan Penetapan Standar Pelayanan	Sosialisasi dan Internalisasi Standar Pelayanan Publik di Ditjen Migas			
						Mengikutsertakan pegawai dalam mengikuti pelatihan IT Project Management				
Peningkatan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Migas						Pengembangan <i>Soft Skills</i> dan integritas dalam penerapan penyelenggaraan pelayanan prima				
						Pengadaan Mesin Antrian	Penerapan Sistem Antrian Otomatis Untuk semua Layanan Publik & Pembuatan Video Prosedur Pelayanan Publik Ditjen Migas	Penyediaan sarana dan prasarana (komputer, prosedur, koneksi internet dll) bagi <i>stakeholders</i> terkait pengajuan pelayanan <i>online</i>	Evaluasi, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kepada <i>stakeholders</i>	

							Otomatisasi Sistem Pelayanan Publik sub sektor Migas	Evaluasi dan Penyempurnaan Otomatisasi Sistem Pelayanan Publik sub Sektor Migas	
							Penyederhanaan Proses Perizinan	Mempersingkat alur perizinan dan penyusunan SOP	Sosialisasi, implementasi, dan evaluasi alur penerbitan perizinan
							Implementasi Standar Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Migas		
			Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik			Pelaksanaan Standar Manajemen Mutu ISO 90001:2008 & Survey Kepuasan Publik Ditjen Migas	Surveillance pelayanan publik	resertifikasi pelayanan publik	surveillance pelayanan publik
							Pelaksanaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat Secara Berkala		
							Berpartisipasi dalam kompetisi penyelenggaraan pelayanan publik		
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat		Usulan Layanan Call Center, Kotak Pengaduan Masyarakat	Implementasi Layanan Call Center & Kotak Pengaduan Masyarakat	Implementasi, Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat yang masuk/diterima	
			Membuka ruang partisipasi publik melalui <i>citizen charter</i>			Perubahan paradigma berfikir aparatur dalam hal pelayanan publik	Melibatkan stakeholder dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan terkait kebijakan publik di sub sektor migas (standar layanan, jenis layanan, waktu prosedur, biaya dan tata cara pelayanan)		
						Pusat Informasi Publik Terpadu Ditjen Migas	Membentuk Tim Pusat Informasi Publik Terpadu	Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat Terkait Kebijakan dan Program-Program yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan	

Area Kelembagaan

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	KEGIATAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	
Birokrasi yang efektif dan efisien	Kelembagaan	Penguatan kelembagaan sesuai dengan nawacita	Penataan kelembagaan Ditjen Migas yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.	Terwujudnya kelembagaan Ditjen Migas yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM untuk mewujudkan nawacita	Nilai Indeks Penguatan kelembagaan Baik	Penataan kelembagaan sesuai Perpres 68 Tahun 2015	Mengusulkan pembentukan Direktorat Infrastruktur				
							Penyiapan data pendukung untuk audit/ reuiu kelembagaan		Penyiapan data pendukung untuk penyusunan instrumen audit kelembagaan		
							Penyiapan data pendukung untuk penataan kelembagaan				
							Penyiapan data pendukung untuk penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah				
							Penyiapan data pendukung untuk evaluasi kelembagaan				
							Penyiapan data pendukung untuk penyusunan instrumen evaluasi kelembagaan		Penyiapan data pendukung untuk penyempurnaan instrumen evaluasi kelembagaan		

Area Akuntabilitas

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Akuntabel	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penyajian Laporan Akuntabilitas Ditjen Migas yang meliputi 5 Komponen Indikator Kinerja "SMART"	Meningkatnya Akuntabilitas Ditjen Migas	Terimplementasi Laporan Akuntabilitas yang sesuai dengan WBK-WBBM KESDM	Menyusun kebijakan penguatan sistem akuntabilitas	Penyempurnaan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Capaian Kinerja Ditjen Migas	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Secara Periodik
							Penyempurnaan Data Kinerja LAKIP			
					Penyusunan Laporan Keuangan didukung sistem informasi berbasis TI	Penyempurnaan sistem informasi untuk pelaporan keuangan yang terimplementasi dan terintegrasi	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem informasi	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem informasi	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem informasi	
						Reviu Internal atas penyusunan laporan keuangan Ditjen Migas	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu internal	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu internal	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu internal	
			Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan strategis sub sektor migas	Tercapainya agenda prioritas kedaulatan energi	Penyusunan peta strategis dalam pelaksanaan dan evaluasi renstra	Pelaksanaan dan revisi Renstra		Tercapainya seluruh Renstra	
				Meningkatnya kinerja dan Akuntabilitas	Akuntabilitas kinerja Ditjen Migas yang baik	Mendukung penyusunan kebijakan penguatan sistem akuntabilitas	Penyajian informasi pelaporan berbasis web sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	Monitoring dan Evaluasi Penyajian informasi pelaporan berbasis web		

								Melakukan koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas untuk mendukung peningkatan sinergi sistem pelaporan	Melakukan koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan	Melakukan koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan
										Melakukan koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas untuk mendukung peningkatan transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja
										Melakukan koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas untuk mendukung peningkatan akuntabilitas publik
						Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi Ditjen Migas	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem manajemen kinerja	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem manajemen kinerja	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem manajemen kinerja	Monitoring dan Evaluasi pengembangan sistem manajemen kinerja

				Sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang baik	Terdapat usulan terhadap pembentukan sistem informasi pengukuran kinerja yang terimplementasi dan terintegrasi sehingga dapat diakses oleh seluruh unit	Mendukung komitmen untuk membuat sistem informasi untuk pengukuran kinerja	Mendukung pembuatan sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang terimplementasi dan terintegrasi	Melaksanakan sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang terimplementasi dan terintegrasi	Reviu internal terhadap pelaksanaan sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang terimplementasi dan terintegrasi	Reviu internal sebagai bahan penyempurnaan sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang terimplementasi dan terintegrasi
--	--	--	--	---	---	--	---	--	---	--

Area Tatalaksana

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang efektif dan efisien	Tatalaksana	Penguatan Tatalaksana (SOP) dan e-government	Penguatan sinergi internal dan eksternal Ditjen Migas	Terwujudnya proses tata laksana yang efektif dan efisien di lingkungan Ditjen Migas sesuai dengan prinsip good governance	Indeks Kepuasan Masyarakat		Identifikasi dan Inventarisasi potensi sinergi SOP AP dan SOP Unggulan (seluruh Proses Bisnis Ditjen Migas)	Pengintegrasian SOP yang memiliki keterkaitan antar unit Eselon I di lingkungan KESDM	Evaluasi dan implementasi pengintegrasian SOP yang memiliki keterkaitan antar unit Eselon I di lingkungan KESDM	Penyempurnaan pengintegrasian SOP yang memiliki keterkaitan antar unit Eselon I di lingkungan KESDM
								Pengintegrasian SOP yang memiliki keterkaitan antar unit Eselon II di lingkungan Ditjen Migas	Evaluasi dan implementasi Pengintegrasian SOP yang memiliki keterkaitan antar unit Eselon II di lingkungan Ditjen Migas	Penyempurnaan pengintegrasian SOP yang memiliki keterkaitan antar unit Eselon II di lingkungan Ditjen Migas
						Mendukung pelaksanaan sinergi MoU dan SOP Link	Mendukung pengintegrasian SOP AP dan SOP layanan Unggulan antar Kementerian/Lembaga	Mendukung implementasi Kegiatan Antar Kementerian/Lembaga		
						Pemberian <i>reward</i> terhadap inovasi penyelenggara administrasi pemerintahan				
					Menyiapkan data usulan penyempurnaan tata naskah dinas dan kearsipan					
					Tersusunnya proses bisnis Ditjen Migas	Mendukung evaluasi dan penyempurnaan peta proses bisnis level 0	Mendukung pengembangan peta proses bisnis level 1	Mendukung pengembangan peta proses bisnis level 2	Mendukung pengembangan peta proses bisnis level 3	Mendukung pengembangan peta proses bisnis level 4

			Penguatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Migas	Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa	Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa dan akuntabel	Percepatan pelaksanaan barang dan jasa		ULP telah menjadi pusat layanan pengadaan barang dan jasa	Pengembangan organisasi ULP Ditjen Migas	Evaluasi pelayanan dan organisasi ULP Ditjen Migas
							Indeks Persepsi Korupsi dan Integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa			
Birokrasi yang efektif dan efisien	Tatalaksana	Penguatan Sistem Informasi	Pengintegrasian aplikasi perijinan Ditjen Migas	Pelayanan perijinan migas terpadu satu pintu online	Indeks Persepsi Korupsi dan Integritas pelayanan publik	1) aplikasi pengembangan investasi migas, 2) aplikasi ijin usaha pengangkutan, 3) aplikasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT), 4) aplikasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	- Integrasi aplikasi pelayanan/ perijinan SKT, NPT, ijin usaha pengangkutan dan SKUP - sosialisasi dan pemantauan aplikasi	- Integrasi aplikasi pelayanan/perijinan lainnya - sosialisasi dan evaluasi aplikasi	- Integrasi aplikasi pelayanan/perijinan lainnya - sosialisasi dan evaluasi aplikasi	- Integrasi aplikasi pelayanan/perijinan lainnya - sosialisasi dan evaluasi aplikasi
			Pengintegrasian data dan informasi Ditjen Migas	terbangunnya war room dengan data dan informasi migas yang terintegrasi baik dari internal maupun eksternal/ stakeholders Ditjen Migas melalui aplikasi dashboard yang komunikatif dan update guna mendukung Pimpinan dalam pengambilan keputusan		inventarisasi data dan informasi migas	Pemetaan data dan informasi migas, pembangunan data warehouse dan pembangunan ruang kendali migas (war room)	- Pemutakhiran data dan informasi migas, integrasi sistem informasi dan pengembangan data warehouse - monitor kesinambungan dan ketersediaan data dan informasi serta evaluasi atas pembangunan data warehouse	- penambahan aplikasi GIS dalam dashboard war room	pemeliharaan data warehouse dan aplikasi dashboard war room

			Penggunaan email address @migas.esdm.go.id	keseragaman penggunaan email instansi dan untuk keamanan transfer data dan informasi		penambahan akun/ email address ke pegawai baru	- pemeliharaan server dan storage yang digunakan untuk memfasilitasi email migas - surat edaran untuk penggunaan email @migas.esdm.go.id	akun/ email address dipergunakan sebagai korespondensi resmi baik dengan internal maupun eksternal Ditjen Migas	- pemeliharaan server dan storage yang digunakan untuk memfasilitasi email migas	
			Penguatan Operator dan Sistem Call Center Ditjen Migas dalam melayani masyarakat	kepuasan masyarakat terhadap responsifitas tindak lanjut yang dilakukan Ditjen Migas atas pengaduan masyarakat		Pembangunan call center Ditjen Migas	- Pengembangan sistem call center - Pengoperasian call center Ditjen Migas - Sosialisasi Call Center Ditjen Migas	- Pengoperasian call center Ditjen Migas - evaluasi dan tindak lanjut atas masukan atau pengaduan masyarakat yang diterima/masuk	- Pengoperasian call center Ditjen Migas - evaluasi dan tindak lanjut atas masukan atau pengaduan masyarakat yang diterima/masuk	- Pengoperasian call center Ditjen Migas - evaluasi dan tindak lanjut atas masukan atau pengaduan masyarakat yang diterima/masuk
		Penguatan Infrastruktur IT	Penguatan infrastruktur IT dan Jaringan	- topologi IT Network yang terintegrasi - Perangkat/ infrastruktur IT yang handal, tepat guna	Indeks Teknologi Informasi	pelaksanaan kegiatan Operasional Jaringan dan Data	- Pengadaan virtualisasi server dengan Vmware - Pengadaan coreswith jaringan	- maintenance perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan - pengadaan perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan sesuai kebutuhan	- maintenance perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan - pengadaan perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan sesuai kebutuhan	- maintenance perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan - pengadaan perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan sesuai kebutuhan
			Pengaturan akses koneksi dan back up koneksi internet	Penyediaan koneksi internet yang stabil dan handal serta manajemen traffic bandwidth yang tepat guna			- pengadaan back up koneksi internet - pengaturan koneksi via kabel dan wireless	- pengadaan back up koneksi internet - pengaturan koneksi via kabel dan wireless	- pengadaan back up koneksi internet - pengaturan koneksi via kabel dan wireless	- pengadaan back up koneksi internet - pengaturan koneksi via kabel dan wireless

			Penerapan sistem keamanan perangkat IT dan aplikasi	Sistem keamanan perangkat IT dan aplikasi terjamin		proteksi network, perangkat dan aplikasi melalui fire wall, antivirus dan password serta pengaturan akses	proteksi network, perangkat dan aplikasi melalui fire wall, antivirus dan password serta pengaturan akses	- proteksi network, perangkat dan aplikasi melalui fire wall, antivirus dan password serta pengaturan akses. - Audit keamanan TI	proteksi network, perangkat dan aplikasi melalui fire wall, antivirus dan password serta pengaturan akses	- proteksi network, perangkat dan aplikasi melalui fire wall, antivirus dan password serta pengaturan akses. - Audit keamanan TI
		Penguatan Tata Kelola IT	Pengembangan struktur/postur aplikasi, infrastruktur, dan organisasi secara high level yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana strategi dan rencana TI yang mencakup keseluruhan organisasi	penyediaan infrastruktur perangkat IT dan pembangunan aplikasi menjadi tepat guna dan tidak over investment	Indeks Teknologi Informasi	Perencanaan Strategis IT	- Pemetaan kebutuhan aplikasi, infrastruktur IT untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dilingkungan Ditjen Migas - SOP tata kelola IT	Penerapan pelayanan dan pengembangan kegiatan IT sesuai perencanaan yang dilakukan secara bertahap	Penerapan pelayanan dan pengembangan kegiatan IT sesuai perencanaan yang dilakukan secara bertahap	Penerapan pelayanan dan pengembangan kegiatan IT sesuai perencanaan
			Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai/personal yang menangani kegiatan IT dan aplikasi untuk mempertajam perkembangan IT yang update dan keahlian dibidangnya	Pegawai yang handal dan kompeten dibidang IT dan aplikasi untuk menunjang kegiatan Ditjen Migas		Training network security and defense	- Training "Information security management dan industrial control system - Training IT Project Management - Sharing knowledge bidang IT untuk pegawai Ditjen Migas	- Pengadaan training keahlian di bidang IT - Sharing knowledge bidang IT untuk pegawai Ditjen Migas	- Pengadaan training keahlian di bidang IT - Sharing knowledge bidang IT untuk pegawai Ditjen Migas	- Pengadaan training keahlian di bidang IT - Sharing knowledge bidang IT untuk pegawai Ditjen Migas

							Mendukung pelaksanaan <i>Assessment Pegawai</i>	Mendukung penyusunan pengembangan <i>Standart Competencies and Model Assessment</i>	Survey <i>Engagement Pegawai I</i>	Survey <i>Engagement Pegawai I</i>
			Assessment SDM Aparatur				Database pegawai yang akan dilakukan assesment dan database pegawai hasil assesment			
									Mendukung Pelaksanaan Survey Kompetensi Pegawai	
									Mendukung Pelaksanaan Survey Orientasi Pegawai	
									Mendukung Pelaksanaan Assessment Center	
							Studi Banding ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah			
			Pengembangan Sumber Daya Manusia				Penyertaan Pengelola Kepegawaian Mengikuti Pelatihan Sertifikasi di Bidang SDM (CHRP)	Pengembangan SDM Berbasis Kinerja		
							TNA untuk Pejabat Struktural JFT & JFU			
							Training bagi pegawai Ditjen Migas selama 80 JP per orang per tahun sebanyak 100 orang			
							Mengusulkan pegawai Ditjen Migas untuk mengikuti Tugas Belajar sebanyak 4 (empat) orang			

						Membangun dan Implementasi Rumah Aspirasi Online (Berikut Kriteria)	Implementasi Rumah Aspirasi		
						Pola Mutasi & Promosi Pegawai	Mutasi Promosi Pegawai Berbasis Kinerja Pegawai		
						Pelaksanaan <i>Sharing Session</i> (Narasumber : Expert dibidang Migas)			
			Manajemen Berbasis Kinerja		Mendukung Pilot Project PBM	Mendukung Penyusunan Kriteria dan Pembentukan Aplikasi PBM	Implementasi Aplikasi PBM	Talent Pool	Evaluasi Pengembangan Analisis PBM
								Program Penghargaan Kinerja Pegawai I	Program Penghargaan Kinerja Pegawai II
						Penyusunan Standar Indikator Kinerja Pegawai sebagai implementasi dan capaian kinerja KESDM	Penerapan Penilaian Standar Kinerja Pegawai	Penerapan Penilaian Standar Kinerja Pegawai	Penerapan Penilaian Standar Kinerja Pegawai
						Membentuk Unit Khusus untuk memantau kinerja pegawai	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi
			Pendidikan dan Pelatihan		Mendukung Pelaksanaan Pelatihan Leadership, Coaching & Managing Conflict Eselon 1 & 2	Mendukung Pelaksanaan Pelatihan Leadership, Coaching & Managing Conflict Eselon 3 & 4, Dan Fungsional	Mendukung Pelaksanaan Pengembangan <i>e-Learning & KM</i>	Mendukung Pelaksanaan Pelaksanaan <i>e-Learning & KM</i>	

			Kesejahteraan Pegawai			Menyusun Surat Usulan Pelaksanaan MCU ke Biro Kepegawaian	Pelaksanaan MCU Pegawai				
							Sosialisasi Kesehatan Pegawai				
							Pengajuan BPJS Kesehatan untuk Seluruh Pegawai				
						Mendukung Konsep Peningkatan Kesejahteraan Pegawai					
						Mendukung Pemberlakuan Remunerasi Berbasis Peringkat Jabatan					
							Implementasi JKK dan JKM	Implementasi JKK dan JKM	Implementasi JKK dan JKM	Implementasi JKK dan JKM	Implementasi JKK dan JKM
				Sistem Informasi Kepegawaian		Mendukung Implementasi SIPEG dan Pemutakhiran Data SDM					Mendukung IHRMS
			<i>Blueprint</i> MESDM		Mendukung Pengembangan <i>Blueprint</i> MSDM					Mendukung Validasi <i>Blueprint</i> MSDM	
			Menyusun Budaya Kerja dan Pemetaan Potensi Pegawai		Teridentifikasinya Budaya Kerja	Upah, promosi, supervisi, benefits, reward, SOP, rekan kerja, budaya kerja, komunikasi					

Area Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang efektif dan efisien	Penataan peraturan perundang-undangan	Penguatan peraturan perundang-undangan	Implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi yang mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui evaluasi, kajian, deregulasi, peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pemanfaatan TIK dalam perumusan peraturan	Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan	-	Melakukan upaya penyempurnaan atau mengubah peraturan perundang-undangan sub sektor Migas yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horisontal				
				Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik	Tercapainya prioritas Prolegnas (Program Legislasi Nasional) KESDM	Perencanaan dalam menyusun peraturan perundang-undangan	Penyusunan kajian regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat proses bisnis di sub sektor migas sesuai dengan program legislasi nasional, Tusi Ditjen Migas dan tindak lanjut putusan MK dan MA	Pembentukan forum konsultasi publik untuk perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Ditjen Migas	Aplikasi pemanfaatan TIK dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di sub sektor migas	Evaluasi dan pengembangan terhadap pemanfaatan TIK dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan.

							Penyusunan kajian dan peraturan yang mendorong pembentukan forum konsultasi publik dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan	Penyusunan kajian dan kebijakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di lingkungan Ditjen Migas	penyusunan peraturan perundang-undangan sampai dengan penetapan dengan koordinasi baik dengan pihak internal Ditjen Migas (unit-unit), Biro Hukum (Setjen) atau Eselon I lainnya dan stakeholder.	Sosialisasi hasil penetapan peraturan perundang-undangan dan dipublikasikan ke internal dan publik (masyarakat) baik dengan konvensional maupun online
						Perencanaan dalam menyusun peraturan perundang-undangan	Penyempurnaan SOP dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perpres, Permen, Kepdirjen/Badan	Evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan melakukan evaluasi implementasinya dan evaluasi terhadap peraturan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru.		